

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAERAH OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PANGANDARAN

Maya Pebriyanti¹, Etih Henriyani², Sahadi³

Universitas Galuh^{1,2,3}

E-mail: mayapebriyanti0202@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi belum optimalnya Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Pangandaran. Hal ini terlihat dari fasilitas kebutuhan pemustaka dan pegawai belum lengkap dan memadai serta terbatasnya sumber daya manusia yang sesuai dengan latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan atau yang berpengalaman lama mengelola perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dengan 7 orang informan dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan perpustakaan daerah oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran yang diukur dengan delapan dimensi belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut terjadi karena masih terjadi hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan perpustakaan daerah oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran yaitu kurangnya fasilitas yang dibutuhkan baik bagi para pegawai maupun pemustaka di perpustakaan daerah Kabupaten Pangandaran, kurangnya pengadaan buku di perpustakaan serta kurangnya sumber daya manusia dalam bidang perpustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Pangandaran yaitu menambah fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk para pegawai dan pemustaka, menambah pengadaan buku dari berbagai sumber, meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pegawai melalui pelatihan dan sosialisasi serta melakukan pengarahan dan evaluasi secara berkala terhadap para pegawai.

Kata Kunci : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, Pengelolaan, Perpustakaan.*

PENDAHULUAN

Perpustakaan dari dulu sampai sekarang memiliki manfaat yang sangat besar dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di

Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa perpustakaan adalah unit informasi yang memiliki tugas dan fungsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan sangat penting bagi masyarakat karena memiliki manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Di dalam pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2007 tentang pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dirumuskan bahwa :

- a. Pengembangan perpustakaan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas adalah upaya meningkatkan perpustakaan, dari mulai sumber daya, pelayanan, dan pengelolaandalam perpustakaan.
- b. Perpustakaan dikembangkan berdasarkan fungsi, tujuan, karakteristik dan dilakukan sesuai kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Secara kesinambungan pengembangan dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

Penyelenggaraan perpustakaan tidak hanya untuk menyimpan dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka, tetapi diharapkan dapat membantudosen, guru, mahasiswa, karyawan dan masyarakat umum dalam mendapatkan tugas-tugas dan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu bahan pustaka yang ada di perpustakaan harus lengkap sehingga segala informasi yang diperlukan oleh masyarakat dan pemustaka dapat ditemukan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai

kebutuhan. Penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan perpustakaan. Menurut Iskandar (2016:7) “Manajemen perpustakaan adalah melakukan kegiatan mengatur, mengarahkan, membimbing, mengendalikan, mempengaruhi staf atau pustakawan agar dapat bekerja, berkarya, melakukan tugas-tugas kepustakawanan untuk mencapai tujuan perpustakaan”.

Dari penjelasan di atas, nampak jelas bahwa perpustakaan merupakan salah satu sarana yang penting dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat. Perpustakaan dalam penyelenggaraannya memerlukan ruang khusus beserta perlengkapannya. Ruang dan perlengkapan yang tersedia harus ditata dan dirawat dengan baik sehingga benar-benar menunjang penyelenggaraan perpustakaan secara efektif dan efisien.

Sehubungan dengan uraian-uraian di atas berdasarkan penjajagan awal penelitian dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran ditemukan beberapa masalah mengenai pengelolaan perpustakaan yang belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagaiberikut :

1. Fasilitas yang tersedia belum lengkap dan memadai, seperti belum tersedianya ruang baca untuk kategori tertentu seperti ruang baca untuk kategori dewasa dan ruang bacareferensi, Meja dan kursi untuk membaca juga kurang

sehingga pengunjung bingung ketika akan membaca buku.

2. Perpustakaan Kabupaten Pangandaran saat ini baru menyediakan buku kurang lebih sebanyak 22.000 buku dan masih belum lengkap dan tidak terbaru. Buku tersebut masih kurang karena buku harus dibagi untuk perpustakaan keliling, untuk program silanglayang (peminjaman buku ke sekolah-sekolah), dan untuk di perpustakaan. Koleksi buku yang masih kurang lengkap di perpustakaan Kabupaten Pangandaran, mengakibatkan pemustaka maupun pengunjung sulit mendapatkan buku yang diinginkan.
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik staf maupun pustakawan yang memiliki kualifikasi ahli dengan latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan atau yang berpengalaman lama mengelola perpustakaan.
4. Fasilitas penunjang pekerjaan para pegawai belum sepenuhnya terpenuhi. Terbukti dari hasil observasi yang dilakukan penulis, belum sepenuhnya ada komputer atau laptop untuk menunjang lancarnya pekerjaan. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan dan kelancaran pekerjaan para pegawai.
Berdasarkan latar belakang

tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Perpustakaan Daerah oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari tujuh orang yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Staf Pengelola Bahan Pustaka, Pustakawan dan 2 (dua) orang pengunjung. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajiandata, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Kerja di Perpustakaan

Perencanaan kerja di perpustakaan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sebuah perpustakaan. Dimana para manajer memikirkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Dalam pengelolaan perpustakaan, perencanaan adalah merencanakan sumber-sumber daya apa saja yang dimiliki oleh pemustaka dan perlunya perencanaan sebelum segala

kecenderungan masa depan yang mungkin terjadi (*future trend*) (Iskandar, 2016).

Perencanaan kerja ini perlu diketahui, dibuat, dan dilaksanakan. Dalam perpustakaan, perencanaan kerja hanya bisa berhasil jika pustakawan memiliki kreativitas. Pustakawan mampu berkreasi, mencari peluang-peluang yang dapat menjadisesuatu yang menarik bagi pemustaka, memudahkan pemustaka dan tujuan akhirnya adalah tingginya tingkat kepuasan pemustaka terhadap layanan yang diberikan.

Dalam penelitian dimensi Perencanaan Kerja di Perpustakaan terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur pengelolaan perpustakaan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, yaitu merencanakan kegiatan dan kebutuhan layanan perpustakaan yang berkualitas dan merencanakan perubahan untuk merespon dan mengantisipasi problematika dalam pelayanan perpustakaan.

Hasil penelitian pada dimensi Perencanaan Kerja di Perpustakaan sejauh ini belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari kedua indikator diatas, terdapat satu indikator yang sudah optimal yaitu merencanakan kegiatan dan kebutuhan layanan perpustakaan yang berkualitas, meskipun tidak dilakukan secara intens dan maksimal. Sedangkan terdapat satu indikator yang belum dilaksanakan

dengan optimal yaitu merencanakan perubahan untuk merespon dan mengantisipasi problematika dalam pelayanan perpustakaan.

Adapun yang menjadi hambatan dalam hal ini yaitu belum ada perubahan seperti fasilitas dan buku-buku yang tersedia belum lengkap, kurangnya perencanaan strategi promosi untuk menarik minat pengunjung dan kurangnya SDM/Pegawai yang profesional sesuai bidangnya masing-masing di Perpustakaan Kabupaten Pangandaran. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran merencanakan perubahan ke arah yang lebih baik seperti dengan menyediakan fasilitas dan buku-buku yang lengkap dan bervariasi agar pengunjung yang datang ke perpustakaan dapat menemukan buku yang di cari dengan mudah, mengadakan kegiatan atau inovasi lain yang dapat menarik minat baca masyarakat sehingga pengunjung perpustakaan meningkat, sertamenambah pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan perpustakaan atau yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Supriyanto (2008) yang mengemukakan bahwa “Sebuah rencana akan memungkinkan organisasi melaksanakan penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Dengan sebuah rencana kita akan mampu mengantisipasi kondisi

business yang akan datang secara lebih awal, sehinggamemungkinkan organisasi melakukantindakan-tindakan untuk mempersiapkan pegawai yang dimilikinya, baik melalui pelatihan, mutasi dan sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan pegawai sebagai adanya perubahan-perubahan di kemudian hari.”

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya perencanaan kerja dalam merencanakan perubahan untuk merespon dan mengantisipasi problematika dalam pelayanan perpustakaan, karena belum adanya perubahan perkembangan dalam mengatasi permasalahan atau hambatan yang terjadi di perpustakaan daerah Kabupaten Pangandaran.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) di Perpustakaan

Pengorganisasian (*Organizing*) di perpustakaan merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan agar tujuan perpustakaan dapat tercapai. Pengorganisasian di perpustakaan adalah usaha dari pimpinan atau manajer perpustakaan untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengatur segala SDP (Sumber Daya Perpustakaan) yang ada di dalam perpustakaan agar fungsi, tujuan, visi, dan misi perpustakaan dapat tercapai.

Pada dimensi Pengorganisasian di Perpustakaan, indikator yang digunakan yaitu adanya sumber daya manusia yang profesional dan adanya tujuan dan

aktivitas kerja yang diarahkan untuk keberhasilan tugas, wewenang, dan kepuasan pemustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi ini belum dapat berjalan dengan optimal. Dilihat dari kedua indikator diatas, terdapat satu indikator yang sudah optimal yaitu adanya tujuan dan aktivitas kerja yang diarahkan untuk keberhasilan tugas, wewenang, dan kepuasan pemustaka. Namun indikator adanya sumber daya manusia yang profesional belum dilaksanakan dengan baik karena terdapat beberapa hambatan dan masalah.

Hambatan-hambatan yang dimaksud tersebut diantaranya masih ada beberapa pegawai yang kurang mengerti dan memahami tugas, fungsi dan peran masing-masing dikarenakan kebanyakan pegawai bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan masih banyak pegawai yang melemparkan tugasnya kepada pegawai yang lain ketika sedang melakukan pelayanan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut upaya yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan pelatihan sesuai bidangnya masing- masing, dan memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan yang sudah bekerja dengan baik agar pegawai yang lain termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dan profesional.

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Iskandar (2016) bahwa “Sebagai perpustakaan apapun

jenisnya, memiliki peran strategis dalam menyimpan, mengatur, dan mengawetkan kekayaan intelektual manusia dalam berbagai bentuk, termasuk berfungsi sebagai pelestari kebudayaan, termasuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa maka kinerja sumber daya pustakawan dituntut adanya profesionalisme agar dapat mendukung tujuan pembangunan nasional.”

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pengorganisasian di perpustakaan belum optimal, karena sumber daya manusia yang ada di perpustakaan daerah Kabupaten Pangandaran dapat dikatakan belum sepenuhnya profesional.

3. Penggerakan (*Actuating*) di Perpustakaan

Penggerakan (*actuating*) adalah kemampuan menggerakkan staf perpustakaan agar melaksanakan tugas sesuai dengan peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing secara baik dan sesuai standar. Penggerakan perlu dilakukan agar kepuasan pemustaka akan layanan perpustakaan dapat terwujud sesuai harapan pemustaka.

Dalam penelitian ini, terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur sejauhmana penggerakan atau menggerakkan staf perpustakaan untuk mencapai keberhasilan kerja, meningkatkan kinerja dan mencapai program kerja perpustakaan, yaitu adanya pengarahan kepada para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan

serta meningkatkan pengembangan pegawai serta meningkatkan minat baca masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan.

Berdasarkan hasil penelitian, dari kedua indikator menunjukkan bahwa dimensi penggerakan di perpustakaan sudah berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari adanya pengarahan yang diberikan kepada para pegawai secara rutin dan sudah dilakukannya peningkatan pengembangan pegawai melalui pelatihan serta meningkatkan minat baca masyarakat melalui sosialisasi ke berbagai sekolah-sekolah dan desa yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Donni Juni Priansa (2018) bahwa “Pengembangan SDM berpijak pada fakta bahwa individu pegawai membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang berkembang supaya ia mampu bekerja dengan baik. Pengembangan SDM dapat diwujudkan melalui pengembangan karir, pendidikan, maupun pelatihan. Melalui pengembangan SDM yang tepat, maka ketergantungan organisasi terhadap rekrutmen SDM baru akan berkurang.” Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi penggerakan (*actuating*) di perpustakaan sudah berjalan dengan optimal terlihat sudah adanya pengarahan yang rutin kepada para pegawainya serta sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk

mengembangkan kemampuan pegawai dan meningkatkan minat baca masyarakat.

4. Pengawasan (*Controlling*) di Perpustakaan

Pengawasan (*controlling*) di perpustakaan merupakan kegiatan yang dapat diartikan melakukan pengamatan, penelitian terhadap semua tugas atau pekerjaan kepustakawanan yang dilakukan oleh pihak manajer perpustakaan (orang tertentu yang memiliki tugas sebagai pengawas) agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan tercapai tujuan perpustakaan sesuai harapan pemustaka dan masyarakat.

Dalam penelitian ini terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur sejauhmana pengawasan di perpustakaan, yaitu secara berkala pimpinan mengecek dan mengevaluasi hasil pekerjaan setiap pegawai, serta mensurvei kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan perpustakaan dan segenap unsur SDP (Sumber Daya Perpustakaan) mengetahui, menyadari dan memahami tugas, peran dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengawasan (*controlling*) belum berjalan dengan optimal, meskipun indikator secara berkala pimpinan mengecek dan mengevaluasi hasil pekerjaan setiap pegawai, serta mensurvei kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan perpustakaan sudah dapat dikatakan

optimal, namun indikator segenap unsur SDP (Sumber Daya Perpustakaan) mengetahui, menyadari dan memahami tugas, peran dan fungsimasing-masing.

Adapun hambatan-hambatan yang ada diantaranya beberapa pegawai dalam melakukan pelayanan tidak cepat tanggap dan sering melemparkan tugasnya kepada rekan kerjanya yang lain. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau masalah tersebut dengan memberikan kegiatan pelatihan kepada para pegawainya dan pimpinan sering melakukan pengawasan dan evaluasi kepada para pegawai agar semua pegawai mengetahui, menyadari dan memahami tugas, peran dan fungsinya masing-masing.

Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Iskandar (2016) bahwa “Pustakawan harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara menyeluruh sehingga implementasi kepustakawanan berdampak pada teralisasinya profesionalisme pustakawan untuk mencapai tujuan perpustakaan.”

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa dimensi pengawasan (*controlling*) di perpustakaan belum berjalan dengan optimal, karena segenap unsur SDP (Sumber Daya Perpustakaan) belum sepenuhnya mengetahui, menyadari dan memahami tugas, peran dan fungsi pekerjaan masing-masing.

5. Pengisian Jabatan (*Staffing*) di Perpustakaan

Perpustakaan termasuk organisasi publik yang perlu melakukan *staffing* dengan kriteria harus sesuai dengan ilmu, pendidikan, dan keahlian masing-masing pustakawan yang diberi amanah, wewenang atau tanggung jawab. Pengisian jabatan (*Staffing*) di perpustakaan adalah penempatan pustakawan sesuai dengan jabatan yang tertuang dalam struktur organisasi yang telah dibuat dan sesuai kinerja serta fungsi masing-masing dari struktur tersebut.

Dimensi pengisian jabatan di perpustakaan pada penelitian ini menggunakan dua indikator yaitu penempatan pegawai sesuai kemampuan dan keahliannya, dan terciptanya efisiensi dan efektivitas serta kemudahan akses perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua indikator belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, seperti penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan dan keahlian pegawai masing-masing serta akses perpustakaan bagi masyarakat belum efektif dan efisien.

Adapun hambatan-hambatan yang dimaksud tersebut antara lain latar belakang pendidikan yang ditempuh sebagian pegawai tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya, aplikasi ipangandaran dan inlislite yang semula digunakan untuk mengakses buku secara online tidak bisa diakses lagi karena

sedang dalam perbaikan. Meskipun letak perpustakaan sudah strategis, namun pengunjung belum banyak yang datang dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya yaitu dengan memberikan pelatihan kepada pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan umum yang tidak sesuai dengan pekerjaannya sekarang, sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan pegawai tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Upaya lain yang digunakan yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki aplikasi dan website perpustakaan yaitu ipangandaran dan inlislite, serta mempromosikan dan mensosialisasikan perpustakaan lebih luas dan rutin kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran agar masyarakat mengetahui informasi lebih jauh mengenai perpustakaan daerah Kabupaten Pangandaran.

Hal tersebut belum sesuai dengan pandangan yang disampaikan oleh Priyono Darmanto (2020) bahwa "Pada dasarnya tujuan dari layanan perpustakaan adalah membantu memenuhi kebutuhan para pengguna dalam menggunakan koleksi serta bahan pustaka yang ada di perpustakaan secara efektif, efisien dan tepat guna. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penyediaan koleksi dan bahan-bahan pustaka serta penyediaan sarana penelusurannya

secara lengkap dan komprehensif."

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa dimensi pengisian jabatan (*staffing*) belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian dalam penempatan pegawai serta akses perpustakaan bagi masyarakat belum berjalan dengan efektif dan efisien.

6. Pemberdayaan (*Empowering*) di Perpustakaan

Banyak pustakawan atau bahkan manajer perpustakaan yang belum memahami pentingnya menerapkan *empowering* di perpustakaan sehingga perpustakaan menjadi kaku, lambat berkembang, dan tidak efektif di dalam mencapai tujuannya. Pemberdayaan di perpustakaan diartikan sebagai pemberdayaan, pembagian kekuasaan atau mendelegasikan wewenang kepada pustakawan di dalam perpustakaan. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan akan menghasilkan potensi, motivasi, kreativitas, dan kemampuan pustakawan untuk memacu kinerjanya demi kemajuan perpustakaan.

Dimensi pemberdayaan pada penelitian ini menggunakan dua indikator yaitu meningkatkan perkembangan perpustakaan sehingga lebih maju, dan meningkatkan inovasi atau kreativitas baru di perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pemberdayaan menunjukkan bahwa kedua indikator belum berjalan dengan optimal. Meskipun salah satu indikator terkait meningkatkan inovasi

atau kreativitas baru di perpustakaan sudah dilakukan, namun indikator meningkatkan perkembangan perpustakaan sehingga lebih maju belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari beberapa fasilitas dan kebutuhan perpustakaan untuk lebih berkembang maju belum sepenuhnya terpenuhi.

Adapun hambatan-hambatan yang mempengaruhi hal tersebut seperti kurangnya sumber daya manusia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pangandaran, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di ruang baca perpustakaan, kurangnya ruang baca di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pangandaran, serta kurangnya buku-buku yang tersedia di perpustakaan.

Selanjutnya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran melakukan beberapa upaya diantaranya merekrut beberapa pegawai non PNS untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, sertamelakukan pengadaan buku-buku dengan berbagai cara seperti dari hibah (sumbangan), dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pangandaran, dari Bantuan Provinsi (Banprov) dan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pusat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Iskandar (2016) bahwa "Pemberdayaan (*empowering*) di perpustakaan perlu direalisasikan dengan baik dan benar.

Untuk itu, diharapkan dengan empowering di perpustakaan akan muncul semangat, kemauan untuk maju, dan terus berkembang dari tenaga perpustakaan sehingga pustakawan mampu mewujudkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, mampu menumbuhkan budaya gemar membaca, dan mampu meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.”

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pemberdayaan (*empowering*) belum dapat berjalan dengan optimal karena belum adanya peningkatan dalam perkembangan perpustakaan agar lebih maju.

7. Memotivasi (*Motivating*) di Perpustakaan

Memotivasi pustakawan adalah melakukan, memerintah, mengarahkan, membujuk, mendorong, menyemangati, menginspirasi pustakawan agar dapat bekerja sama, dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dapat lebih bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melaksanakan tugas kepastakawanan yang diamanahkan kepadanya sehingga tercapai tujuan perpustakaan.

Dalam penelitian ini, terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur sejauhmana pimpinan ataupun pemimpin memberikan motivasi kepada para pegawainya. Indikator tersebut yaitu menyemangati pegawai untuk

bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kepastakawanan yang diamanahkan kepadanya dan mengadakan kegiatan atau *event* yang menarik minat pengunjung perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi memotivasi di perpustakaan menunjukkan bahwa kedua indikator mengenai menyemangati pegawai dan mengadakan kegiatan atau *event* yang dapat menarik minat pengunjung belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat karena masih terdapat hambatan-hambatan dalam proses memotivasi para pegawainya dan belum ada kegiatan atau *event* yang dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan.

Adapun hambatan-hambatan yang timbul yaitu pelayanan yang diberikan tidak cepat tanggap, dan pegawai yang tidak disiplin terbukti pada saat jamkerja masih ada pegawai yang berleha-leha dan bersantai dimana saja. Terbatasnya anggaran untuk mengadakan *event* tertentu dan kegiatan atau *event* yang diadakan kurang menarik perhatian masyarakat, sehingga belum secara optimal dapat meningkatkan minat pengunjung perpustakaan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya melakukan pemberian semangat dan motivasi agar para pegawai dapat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas kepastakawanan yang diamanahkan kepadanya serta melakukan pengawasan

dengan ketat terhadap setiap pegawai. Upaya lain merencanakan beberapa kegiatan atau *event* yang lebih menarik agar semakin banyak yang mengunjungi perpustakaan.

Hal tersebut belum sesuai dengan pernyataan dari Iskandar (2016) yang menyatakan bahwa “Memotivasi pustakawan adalah melakukan, memerintah, mengarahkan, membujuk, mendorong, menyemangati, menginspirasi pustakawan agar dapat bekerja sama, dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dapat lebih bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melaksanakan tugas kepastakawanan yang diamanahkan kepadanya sehingga tercapai tujuan perpustakaan.”

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya motivasi yang diberikan dengan optimal karena belum adanya pemberian semangat dan motivasi secara intens kepada para pegawai serta belum adanya kegiatan yang dapat menarik minat pengunjung.

8. Fasilitas (*Facilitating*) di Perpustakaan

Fasilitas (*Facilitating*) di perpustakaan adalah fasilitas yang diperlukan agar menyenangkan bagi pemustaka sehingga mereka dapat memanfaatkan perpustakaan dengan baik, sedangkan fasilitas bagi pustakawan adalah dapat melaksanakan pekerjaan kepastakawanan dengan baik sehingga tujuan perpustakaan dapat tercapai.

Fasilitas perlu disiapkan oleh lembaga induk atau pihak perpustakaan agar perpustakaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Fasilitas juga akan mempengaruhi keberhasilan perpustakaan dalam memberikan layanan.

Dalam penelitian ini terdapat dua indikator yang digunakan, yaitu menyediakan koleksi perpustakaan, ruang baca, dan rak buku yang memadai bagi pemustaka, serta memperbaiki dan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan pegawai dan pemustaka.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi fasilitas di perpustakaan menunjukkan bahwa kedua indikator mengenai menyediakan, memperbaiki dan melengkapi fasilitas koleksi perpustakaan, ruang baca dan rak buku bagi pemustaka dan pegawai belum berjalan dengan optimal. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, seperti belum lengkap dan memadainya ruang baca, buku dan fasilitas yang dibutuhkan pegawai dan pemustaka sehingga kepuasan pemustaka dan pegawai akan fasilitas yang ada belum terpenuhi.

Adapun hambatan-hambatan yang dimaksud seperti terbatasnya anggaran, ruang baca yang tersedia hanya ada satu ruang baca yaitu ruang baca untuk kategori anak, serta buku-buku yang tersedia masih kurang. Kurangnya fasilitas kebutuhan para pegawai seperti komputer dan laptop yang tidak memadai dan kurang, fasilitas seperti meja dan

kursi untuk membaca belum ada, sehingga pemustaka yang ingin membaca kurang nyaman.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu melakukan penambahan dan penataan ruang baca agar semua pengunjung baik anak-anak maupun dewasa bisa membaca dalam ruangan yang berbeda-beda sesuai kategorinya masing-masing, serta mengadakan pengadaan buku lebih sering yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat dan hibah (sumbangan). Menyediakan fasilitas yang lebih lengkap untuk para pegawai dan menambah ruang baca untuk kategori pemustaka dewasa dan ruang baca lain seperti ruang baca referensi dan lain-lain sehingga pemustaka bisa menggunakan ruang baca sesuai dengan kebutuhan, dan pustakawan berusaha untuk menambah buku-buku yang lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Hal tersebut belum sesuai dengan pendapat dari Priyono Darmanto (2020) yang menyatakan bahwa “Sebuah perpustakaan pasti membutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu haruslah memadai dan dapat menunjang keberlangsungan perpustakaan itu sendiri. Sarana dan prasarana perpustakaan seyogyanya memerhatikan ukuran, jumlah, model, tipe, kualitas, warna, serta jenis sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan untuk

mengoptimalkan peralatan dan perlengkapan tersebut sesuai dengan kebutuhan perpustakaan masing-masing.”

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa dimensi fasilitas (*facilitating*) di perpustakaan belum dapat berjalan dengan optimal, karena masih belum lengkapnya fasilitas yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Pangandaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Perpustakaan Daerah oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal. dilihat dari 8 dimensi yang dijadikan alat ukur penelitian terdapat hambatan-hambatan sehingga belum sesuai dengan pelaksanaannya, seperti fasilitas umum yang tersedia belum lengkap dan memadai, yaitu kurang tersedianya ruang baca, fasilitas seperti meja dan kursi untuk membaca juga kurang. Perpustakaan Kabupaten Pangandaran saat ini baru menyediakan buku kurang lebih sebanyak 22.000 buku dan masih belum lengkap dan tidak terbaru. Sumber daya manusia yang terbatas, baik staf maupun pustakawan yang memiliki kualifikasi ahli dengan latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan atau yang berpengalaman lama mengelola perpustakaan. Fasilitas penunjang pekerjaan para pegawai belum

sepenuhnya terpenuhi seperti belum sepenuhnya ada komputer atau laptop untuk menunjang lancarnya pekerjaan. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan dan kelancaran pekerjaan para pegawai.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah menyediakan fasilitas yang lebih lengkap untuk para pegawai dan menambah ruang baca untuk kategori pemustaka dewasa dan ruang baca lain seperti ruang baca referensi dan lain-lain sehingga pemustaka bisa menggunakan ruang baca sesuai dengan kebutuhan. Menambah pengadaan buku yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat dan hibah (sumbangan). Memberikan pelatihan kepada pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan umum yang tidak sesuai dengan pekerjaannya sekarang, sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan pegawai tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Serta menambah fasilitas penunjang pekerjaan para pegawai seperti penambahan komputer untuk memperlancar pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Darmanto, Priyono. 2020. *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Hartono. 2017. *Manajemen Sistem Informasi Perpustakaan*. Jakarta : Gava Media.

Iskandar. 2016. *Manajemen dan Budaya Perpustakaan*. Bandung : PT Refika Aditama.

Lasa HS. 2005. *Manajemen Perpustakaan*. Yogyakarta: Gama Media.

Nawawi. 2001. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Priansa, dan Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien dan Profesional*. Bandung :Alfabeta.

Priansa, Doni. 2018. *Perencanaan & Pengembangan SDM*. Bandung :Alfabeta.

Supriyanto, Wahyu dan Ahmad Muhsin, 2008. *Strategi Perancangan Perpustakaan Digital*. Yogyakarta ; Kanisius.

Sumber Undang-Undang :

Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota